

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai angka di atas 200 (dua ratus) juta lebih yang tercatat resmi sebagai warga negara Indonesia. Semua penduduk tersebar luas diseluruh Indonesia tidak terkecuali kota kota besar yang ada di Indonesia. Bahkan daerah-daerah terpencil sekalipun memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak

Namun hal ini berbanding terbalik dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dimana pengangguran masih banyak angkanya terutama di pulau jawa karena pulau jawa bisa dikatakan sebagai pusat dari negara Indonesia itu sendiri. Tercatat ada kurang lebih sekitar 90 juta penduduk warga Negara Indonesia tinggal di pulau Jawa. Tidak sedikit juga angka pengangguran yang ada di Pulau Jawa.

Fenomena ini mengakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia setelah sebelumnya sudah banyak yang mengalami pengangguran. Dalam kondisi seperti ini pemerintah dituntut untuk bisa mengatasi permasalahan pengangguran ini, tidak terkecuali pemerintah daerah yang harus bisa mengatasi masalah ini. Salah satu daerah yang memiliki jumlah pengangguran dengan jumlah yang cukup banyak adalah di Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah penduduk sebanyak 1.705.691 jiwa (2020). Dibawah ini adalah data jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat:

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pengangguran
2018	1.683.711	69.000
2019	1	62.000

Tabel 1. 1: Data Penduduk KBB

Hal ini tidak boleh dibiarkan terus menerus begitu saja, karena sudah ada dalam Undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 5 yang mengatur ketenagakerjaan yang menagndung isi “*setiap tenaga kerja memiliki kesempatan tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan*”. Oleh sebab itu Pemkab Bandung Barat pun tidak bisa tinggal diam melihat kondisi dan fhenomena yang terjadi saat ini dan juga harus bisa cepat tanggap dalam menyediakan lapangan kerja untuk bisa mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sehingga kemiskinan dan pengangguran pun tidak terus bertambah.

Untuk mengatasi hal ini akhirnya Kabupaten Bandung Barat membuat kebijakan baru untuk mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat yang angka pengangguranya bisa dibidang tinggi. Sebuah program baru yang akan di adakan pihak Pemda Kaupaten Bandung Barat adalah program Skill Development Centre atau disingkat dan sering disebut sebagai SDC. Ya, program Skill Development Centre ini adalah sebagai peningkatan kerja sama diantara Pemerintah Pusat, Pemda serta Industri dalam peningkatan keahlian tenaga kerja sesuai keperluan pasar kerja di setiap daerah, serta sebagai salah satu program atau model yang di usung oleh BAPPENAS sebagai salah satu respon terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yaitu Inpres no 9 tahun 2016

yang mana untuk merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi (Disnakertrans KBB, 2018). Kemudian setelah inpres tersebut dikeluarkan, Pemda Kabupaten Bandung Barat akhirnya mengambil langkah selanjutnya dengan Membuat SK Bupati Bandung Barat Nomor: 188.45/Kep. 209 -Disnakertrans/2019 yang berisi pembentukan Forum Skill Development Center di Kabupaten Bandung Barat.

Misi dari dibentuknya dan diberlangsungkannya *Skill Development Centre* (SDC) atau peningkatan keterampilan pekerja di Bandung Barat ini adalah untuk meminimalisir jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Sudah ada 20 daerah di Indonesia yang sudah menerapkan program SDC ini diantaranya adalah di Provinsi Bali yakni Kota Denpasar, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yakni di Aceh Tamiang dan beberapa kota/kabupaten lain yang memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di daerahnya masing-masing. Karena program SDC ini adalah program yang di wasiatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, maka program ini diserahkan dan dipercayakan kepada Dinas Ketenaga Kerjaan Kabupaten Bandung Barat. Disnaker Bandung Barat telah mendapat kepercayaan dari 3 lembaga untuk melaksanakan program Skill Development Centre ini.

Program Skill Development Centre ini sebelumnya sudah ada dan dilaksanakan dengan metode yang berbeda, yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat dan setelah pelatihan selesai, masyarakat yang sudah memenuhi syarat langsung mendapatkan sertifikat oleh pihak Disnakertrans Kabupaten Bandung barat (KBB) dan langsung menyerahkan kepada warga tersebut untuk

mencari pekerjaan. Kabupaten Bandung Barat adalah daerah ke-6 setelah solo yang mengadakan program Skill Development Centre.

Menurut KADIS Bapak Akhmad Panji Hernawan, S.H., M.Si. secara singkat dapat dijelaskan mekanismenya sebagai berikut, dunia Industri di Kabupaten Bandung Barat (Sektor Manufaktur, Sektor Garmen, Sektor Pertanian, Sektor Jasa, Sektor Farmasi, Sektor Hotel, Sektor Hotel, Perdagangan dan Resto) Dilakukan Mapping tentang kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan Okupasi yang dibutuhkan oleh dunia Industri. Kemudian lulusan SMK (penganggur) mengikuti Workplace di tempat yang memenuhi pesyaratan dengan instruktur bersertifikat BNSP.

Kompetensi dan daya saing sulit, menjadikan jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat semakin bertambah banyak. Makin tingginya angka angkatan kerja tidak sesuai dengan tersedianya lapangan kerja dimana kapasitasnya justru semakin berkurang. Selain itu adanya ketidakcocokan antara pekerjaan yang dilakukan dengan pendidikan yang ditempuh dimana masih banyak angkatan kerja yang bekerja tidak selaras dengan pendidikan atau pelatihan yang ditempuh.

Maka darinya Bupati Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara menginstruksikan untuk dilaksanakannya SDC ini yang kemudian dilimpahkan tugasnya kepada Disnakertrans Kab. Bandung Barat dimana beliau juga berkata bahwa program Skill Development Centre ini bisa melakukan 10.000 penerapan di perusahaan maupun wirausahawan.

Peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan dan dinyatakan telah Kompeten akan diberikan sertifikat Kompetensi. Peserta pelatihan tersebut wajib diterima bekerja oleh dunia Industri, sebagaimana permintaan tenaga kerja yang telah dilakukan sebelumnya oleh dunia industri dalam tahap Mapping. Selain dari kekhawtiran dengan banyaknya pengangguran di Kabupaten Bandung Barat, latar belakang dibentuknya program Skill Development Centre ini adalah adanya tantangan yang sedang dihadapi oleh Pemkab Kabupaten Bandung Barat diantaranya adalah:

1. Harus bisa menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Bandung Barat dan bagaimana meningkatkan daya saing kerja melalui upaya peningkatan partisipasi angkatan kerja.
2. Pendekatan kerja sama dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung Barat.

Skill Development Centre ini adalah sebuah forum koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi yang melibatkan tiga unsur ABG sebagai pelaku utama. Forum SDC melibatkan 3 unsur utama pemangku kepentingan terkait dengan unsur Academic (Diklat) unsur Busines (DUDI) dan unsur Government (Pemda), atau sinergi ABG. Skill Development Center ini dibawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah terkait. yaitu:

1. Unsur Akademik atau Lembaga Diklat (SMK/BLK/LPK)
2. Unsur Dunia Usaha Dunia Industri (APINDO)
3. Unsur Pemkab (Disnaker, Disperin, Disdik serta OPD terkait lainnya)

Tiga unsur tersebut diarahkan untuk dapat melakukan koordinasi dalam mengatasi masalah ketenaga kerjaan, yaitu pengangguran lulusan SMK agar bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah.

Menurut Kadisnakertrans Kabupaten Bandung Barat (KADIS), Iing Solihin mengatakan bahwa pada saat ini Disnaker sedang fokus kepada masalah pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung Barat agar cepat bisa mengurangi jumlah pengangguran secara signifikan. Maka dari itu Iing berharap dorongan dari semua stakeholder agar program ini bisa terlaksana secara efektif dan efisien serta bisa dengan cepat mengatasi pengangguran yang ada di Bandung Barat.

Selain dari keinginan Kadisnakertrans untuk fokus dalam mengatasi pengangguran ini, selain itu juga melihat data di lapangan bahwa pengangguran di Kabupaten Bandung Barat ini masih sangat banyak sekali bahkan dalam beberapa tahun terakhir pengangguran disana ((Disnakertrans KBB, 2018)

Dilihat dari uraian latar belakang diatas, dengan masih tingginya tingkat atau angka pengangguran yang ada di Kabupaten Bandung Barat serta adanya program SDC ini, maka penulis membuat tema makalah tentang program *skill development centre* dengan judul **“INOVASI PROGRAM *SKILL DEVELOPMENT CENTRE (SDC)* DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANDUNG BARAT”**.

B. Identifikasi Masalah

Program Skill Development Centre (SDC) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat ini dibuat juga diadakan karena melihat dari beberapa masalah yang ditemukan di Bandung Barat diantaranya berikut ini.

1. Adanya masalah pengangguran yang terdapat di Kabupaten Bandung Barat dimana pada 3 tahun terakhir ini angka pengangguran masih terbilang cukup tinggi dimana masih menginjak angka 60.000 orang lebih.
2. Lulusan SMK yang kebanyakan masih bingung dalam menentukan pekerjaan sehingga diantaranya dari jumlah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat tidak sedikit adalah lulusan dari SMK.
3. Rendahnya kualitas SDM di Kab. Bandung Barat sehingga diharapkan dengan adanya program ini kualitasnya menjadi semakin meningkat.
4. Program SDC yang diadakan sebelumnya belum maksimal dalam mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Bandung Barat.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Pada program Skill Development Centre (SDC) yang dilaksanakan dan selenggarakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Barat ini, tujuan atau sasaran utama dari program ini adalah partisipan angkatan kerja yang sedang menganggur dan juga lulusan

dari smk yang baru saja lulus. Dan agar program ini bisa dibahas secara lebih terfokus maka dari itu inovasi ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja kegiatan baru dari program Skill Development Centre ini ?
2. Bagaimana pelaksanaan program SDC ini dijalankan ?
3. Siapa yang menjadi objek utama dari kegiatan SDC ini ?

D. Tujuan Penelitian

Melihat dari rumusan masalah yang ditemukan dalam penelitian ini, oleh sebab itu tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ide atau hal baru tentang program Skill Development Centre
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Skill Development Centre
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendorong dan penghambat program Skill Development Centre

E. Manfaat Hasil Penelitian

Kegunaan penelitian dari Inovasi Program Skill Development Centre (SDC) di Disnakertrans KBB ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penulis berharap penelitian yang dilakukan ini bisa menjadi referensi untuk memperluas pengetahuan dan juga bisa untuk acuan dan masukan dalam

pengembangan ilmu kebijakan publik, khususnya berkaitan dengan Program Skill Development Centre (SDC).

2. Kegunaan Praktisi

a. Untuk Penulis

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan pengetahuan yang diperoleh oleh peneliti antara teori dengan apa yang terjadi dilapangan. Selain itu juga agar bertambah pengetahuan penulis pada ilmu Administrasi Publik yang berfokus di bidang kebijakan publik melalui cara teoritis ataupun praktis.

b. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan saran untuk pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola kebijakan program Skill Development Centre (SDC) agar bisa tercapai dan terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Untuk Umum

Penulis berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi bahan masukan untuk masyarakat atau pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteliti di teliti terutama bagi masyarakat yang ingin mengikuti program ini.

d. Untuk Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian dari penulis ini bisa menjadi referensi tersendiri bagi peneliti selanjutnya pada bidang ilmu yang sama dan dapat lebih digali lagi secara mendalam.

F. Kerangka Pemikiran

Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana dan dari siapa saja kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis. Kebijakan publik yaitu sebuah proses dari Administrasi publik yang bertujuan untuk mengatasi masalah yang terdapat didalam lingkungan masyarakat . Charles O Jhons mengungkapkan bahwa kebijakan yaitu sebuah unsur formal atau keputusan resmi dari berbagai program atau berbagai keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemerintah . Formal disini yaitu suatu hal yang dilakukan dengan sengaja serta mengandung program-program dari pemerintah dan keputusan resmi yang ditetapkan, menentukan aturan serta jika dilakukan akan diberikan sanksi tertentu.

Pada waktu tertentu, setiap lembaga pemerintahan selalu menghadirkan atau menyelenggarakan kebijakan-kebijakan baru yang belum pernah diadakan sebelumnya, dimana kebijakan baru tersebut diharapkan bisa membantu permasalahan publik yang sedang dialami oleh instansi pemerintahan tersebut. Kebijakan baru yang diterapkan ini adalah disebut sebagai Inovasi kebijakan.

Menurut Mirlinda Batalli 2011 dalam (Sururi, 2017:20) dirinya memberikan kesimpulan bahwa proses inovasi administrasi publik memiliki tujuan yaitu memodernikan kemampuan administrasi dan membuat pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta akuntabel

Inovasi kebijakan publik konseptual diatikan dengan dirubahnya pandangan atau problem yang terjadi hingga mengeluarkan solusi atau masalah

yang baru. konteks inovasi kebijakan konseptual yaitu memunculkan paradigma, gagasan, ide, pemikiran dan praktek baru yang awalnya tidak pernah ada.

Pandangan inovasi kebijakan publik sudah menjadi teori serta kegiatan dalam birokrasi pemerintah. Dalam lingkup paradigma dan cara pandang seperti itu , kebijakan publik bisa dipandang sebagai satu proses yang saling berkaitan dan berhubungan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan para pihak yang berkepentingan dalam mengatur, mengelola dan membereskan semua kepentingan publik baik urusan, masalah publik dan sumber daya yang ada untuk kepentingan semuanya (bersama). Salah satu daya saing sebuah inovasi bisa dimunculkan melalui pemikiran dan terobosan terbaru melalui strategi kebijakan publik.

Merujuk pada pendapat dari Everett M. Rogers (1983) dalam (Suwarno, 2008:9) inovasi ialah beberapa ide atau gagasan, kemudian objek dan juga praktik yang dilandasi serta diterima merupakan sesuatu hal yang dianggap baru oleh seorang atau juga sekelompok individu tertentu untuk diaplikasikan atau pun juga diadopsi. Jadi menurut teori *Everett. M. Rogers* (1983) ada 3 unsur didalam teori Inovasi diantaranya adalah:

1. *Idea* (ide/gagasan)
2. *Practice* (praktek/pelaksanaan)
3. *Object* (objek/sesuatu hal)

Kebijakan publik yang baru akan bisa disebut sebagai inovasi kebijakan apabila kebijakan yang baru tersebut bisa membantu memecahkan masalah pemerintahan yang ada. Maka dari itu penelitian ini sangat relevan dengan teori inovasi yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers sehingga teori ini dapat membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.

Dilihat dari beberapa pendeskripsian diatas baik melalui penelitian, pengetahuan, maupun pendekatan yang menjadi kerangka pemikiran maka dapat diungkapkan beberapa anggapan pemikiran dasar berikut:

1. Kebijakan publik atau keputusan pemerintah merupakan suatu kegiatan-kegiatan yang diorganisasikan didalam pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam menggapai tujuan sasaran khusus seperti mengamati program Skill Development Centre yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat
2. Program Skill Development Centre merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menurunkan angka pengangguran yang ada di Kabupaten tersebut. Program ini sebagai bentuk dari respon InPres (Instruksi presiden) no 9 tahun 2016 mengenai revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya persaingan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Indonesia.

Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikira



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG